

**INDEKS INKLUSI KEUANGAN INDONESIA
(ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO)**

*¹Mohammad H. Holle, ²Aisa Manilet

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon

¹hanafi.holle@iainambon.ac.id

²icamanilet2018@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini berupaya mengidentifikasi dan mengkaji indeks inklusi keuangan Indonesia dari sektor usaha lembaga keuangan mikro, serta hambatan, peluang, dan tantangannya, bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Sebagai alat analisis, metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses induktif. Berdasarkan hasil penelitian, 1. Indeks inklusi keuangan Indonesia masih cukup rendah yang disumbangkan sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kelompok masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan jasa keuangan resmi, terutama sebagai sumber utama kas dan pembiayaan, akibatnya, pembuat kebijakan harus memperluas ketersediaan inklusi keuangan. Sektor usaha LKM hanya menyumbang 0,72 persen dibanding sektor usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa LKM yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat memiliki kontribusi terkecil. 2. Literasi keuangan hanya berkontribusi 0,85 persen terhadap indeks inklusi keuangan Indonesia dan menjadi penghambat dalam upaya perluasan indeks inklusi keuangan Indonesia. Padahal LKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena LKM menyediakan pendanaan skala kecil, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka. Keuangan mikro, di sisi lain, menawarkan pinjaman, deposito, transfer uang, asuransi, dan pembayaran kepada pengusaha mikro, kelompok berpenghasilan rendah, dan rumah tangga miskin.

Kata kunci: *Indeks, Inklusi Keuangan, Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro.*

ABSTRACT

The goal of this study is to identify and examine Indonesia's financial inclusion index from the perspective of the microfinance institution business sector, as well as the obstacles, opportunities, and challenges that policymakers face in increasing the financial inclusion index, which has implications for improving people's welfare. Were compared using the research method of literature study. The descriptive qualitative technique employs an inductive process as an analytical tool. Based on the research results; 1). Indonesia's financial inclusion index is still quite low, contributed by the microfinance institutions (MFI) sector. Community groups in Indonesia have not fully utilized official financial services, especially as the main source of cash and financing. In comparison to other business sectors, the MFI business sector only makes up 0.72% of the total. This demonstrates that MFIs, the cornerstone of the local economy, make up the least amount of the total. 2). The financial inclusion index in Indonesia is limited by the low contribution of financial literacy, which stands in the way of efforts to raise the index. Actually, it is anticipated that MFIs will strengthen the local economy. MFIs are small-scale funders, so it's critical to boost

their involvement. On the other hand, microfinance provides low-income individuals, low-income groups, and microentrepreneurs with loans, deposits, money transfers, insurance, and payments.

Keywords: *Index, Financial Inclusion, Indonesia, Microfinance Institutions*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan diperuntukkan bagi masyarakat guna memanfaatkan berbagai layanan akses jasa dan produk keuangan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2020) terutama mereka yang *unbankable*¹.

Indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 adalah 76,19%. Naik dari tahun sebelumnya. Sumbangsih ini berasal dari sektor Perbankan 73,88%, diikuti lembaga pembiayaan 14,56%, Perasuransian 13,15%, Pegadaian 12,38%, Dana Pensiun 6,18%, dan Pasar Modal 1,55%. Sedangkan sektor usaha lembaga keuangan mikro (LKM) berkontribusi terkecil 0,72%. Artinya ada hambatan LKM yang menjadi basis ekonomi masyarakat kurang berkontribusi. Begitupun literasi keuangan LKM hanya mampu menyumbang 0,85%². Berikut data sumbangsih inklusi keuangan dari berbagai sektor pembiayaan, baik bank maupun non bank termasuk lembaga keuangan mikro di Indonesia.

Rendahnya kontribusi LKM ikut berdampak pada rendahnya inklusi keuangan Indonesia. Hasil penelitian³, mengungkapkan di Indonesia kelompok masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal, khususnya, sebagai sumber keuangan dan pembiayaan utama. Sehingga, pengambil kebijakan perlu untuk meningkatkan availabilitas inklusi keuangan.

Hal ini penting dilakukan pemerintah Indonesia. Apalagi kegiatan keuangan mikro telah menyebar ke seluruh dunia. Menurut Bhanot, Bapat dan Bera dalam Nogueira, et.al (2020)⁴. Mengaku keuangan mikro sudah membantu puluhan juta rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional dan menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang kurang beruntung dengan total pinjaman yang diperkirakan mencapai US \$ 114 miliar, sektor keuangan mikro telah menjangkau sekitar 139 juta klien berpenghasilan rendah dan kurang terlayani.

Pada konteks inklusi keuangan, posisi LKM adalah alat yang efektif untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat saat ini. Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat yang kurang beruntung atau rumah tangga berpenghasilan rendah, serta usaha mikro mereka, seperti kredit, deposito, asuransi, dan transfer uang. Konsep ini menekankan perluasan layanan keuangan yang terkait secara historis, seperti kredit mikro, dan layanan yang ditargetkan, seperti masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

¹ Tahiri Jouti, A. (2018). Islamic finance: financial inclusion or migration?. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 277-288.

² OJK, P. O. J. K. (2020). dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559-574.

³ Elgali, I., Omar, O., Dahlin, C., & Thomsen, P. (2017). Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. *European journal of oral sciences*, 125(5), 315-337.

⁴ Tang, R., Nogueira, R., Zhang, E., Gupta, N., Cam, P., Cho, K., & Lin, J. (2020). Rapidly bootstrapping a question answering dataset for COVID-19. *arXiv preprint arXiv:2004.11339*.

Keuangan mikro kata Qadariyah dan Permata (2017)⁵ memiliki dua karakteristik utama yang membedakannya dari layanan keuangan tradisional: pinjaman atau deposito kecil dan tidak ada jaminan dalam bentuk aset. Layanan keuangan mikro dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang fungsi utamanya menyediakan layanan keuangan mikro, lembaga keuangan formal dengan unit layanan keuangan mikro, dan lembaga keuangan terdesentralisasi.

Olehnya itu, penelitian Babalola, et.al., menyatakan penting adanya peningkatan kontribusi LKM karena menawarkan pembiayaan berskala kecil. Disisi lain, keuangan mikro menyediakan layanan pinjaman, deposito, transfer uang, asuransi, dan pembayaran kepada pelaku usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah dan rumah tangga miskin (Ahmed & Babalola, 2016).

Penelitian lainnya, Milana dan Arvind Ashta, (2020)(Milana & Ashta, 2020), Hermes, et.al (2020)(Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, 2018), Porkodi dan Aravazhi (2013)S Porkodi dan D Aravazhi, "Role OF Microfinance and Self Help Groups in Financial Inclusion," *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research* 2, no. 3 (2013): 137–149, www.indianresearchjournals.com., Ibor et.al (2017)Bassey Ina Ibor, Amenawo Ikpa Offiong, dan Enyeokpon Samuel Mendie, "Financial Inclusion and Performance of Micro, Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria," *International Journal of Research -Granthaalayah* 5, no. 3 (2017): 104–122, <http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i3.2017.1758>., Al-Awlaqi dan Aamer (2019)(Al-Awlaqi & Aamer, 2019), Li et.al (2020)⁶, Masnita et.al (2020)Yolanda Masnita, Hermien Triyowati, dan Khomsiyah Khomsiyah, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan," *Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera* 1, no. 1 (2020): 26., berkisar LKM dan kemiskinan, akses layanan, inklusi keuangan perbankan. Disinilah perbedaan mendasar riset ini dengan riset sebelumnya. Penelitian LKM dan inklusi keuangan secara spesifik masih jarang dilakukan, padahal LKM menjadi wadah geliat ekonomi masyarakat kecil. Riset ini bertujuan mengungkap inklusi keuangan Indonesia dengan menganalisis kontribusi LKM.

Disisi lain, inklusi keuangan berdampak pada perekonomian Indonesia yang tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meski sempat melambat pada 2019, dengan pertumbuhan 4,79 persen pada 2015, 5,02 persen pada tahun berikutnya, 5,17 persen pada 2018, dan 5,17 persen pada 2019. 5,02 persen merupakan nilai dari ekonomi. Penyakit, emisi, dan pendapatan semuanya akan diperburuk oleh ekspansi ekonomi yang cepat. Kemiskinan dan memperhitungkan relatif tinggi di Indonesia, dengan rasio Gini 0,382 pada 2019 dan tingkat kemiskinan 9,41 persen.

Menurut OJK (2017)⁷, konsep inklusi ini diharapkan berdampak pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, terciptanya sistem keuangan, dukungan program

⁵ Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4 (1), 10.

⁶ Li, C., Yang, Y., & Ren, L. (2020). Genetic evolution analysis of 2019 novel coronavirus and coronavirus from other species. *Infection, Genetics and Evolution*, 82, 104285.

⁷ OJK, P. O. J. K. (2020). dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559-574.

pencegahan, dan pengurangan konflik antar manusia dan antar daerah. Partisipasi itu termasuk kontribusi lembaga keuangan mikro (LKM).

Dilain sisi, hubungan negatif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Menurut penelitian Kim (2016)⁸, inklusi dapat menggeser hubungan negatif antara ekonomi dan pertumbuhan (trade-off antara pertumbuhan dan) menjadi hubungan positif (penurunan dan peningkatan pertumbuhan), dan dampak negara signifikan.

Dalam skenario ini, penggunaan sampel 15 provinsi di Indonesia yang berada di kuadran tiga kelas, di mana kuadran kelas tiga merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan yang kuat tetapi tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah, menghasilkan hubungan negatif. . Dalam skenario ini, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dihasilkan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang moderat di provinsi yang menjadi anggota kuadran 3, atau masih ada trade-off dalam memperluas pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hal ini menyebabkan peningkatan pendapatan sejumlah kecil orang yang signifikan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain, sejalan dengan pandangan tradisional, yang terus tumbuh di kuadran ini, mengarah pada kesimpulan bahwa jenis pertumbuhan ekonomi ini tidak bahagia.

Menurut Bank Indonesia (2017), inklusi keuangan menjadi tren setelah krisis keuangan 2008, karena dampak krisis pada kelompok di bawah piramida (pendapatan rendah tidak teratur, penyandang disabilitas, pekerja tanpa dokumen identitas hukum, dan komunitas terpinggirkan). Di luar negara-negara kaya, jumlah orang tanpa rekening bank relatif tinggi. Untuk itu kontribusi LKM terhadap inklusi keuangan Indonesia, menjadi sangat penting untuk diteliti lebih jauh, termasuk hambatan, peluang, tantangan, dan solusi bagi pengambil kebijakan karena berkaitan dengan posisi dan kepentingan strategis LKM sebagai ujung tombak perekonomian rakyat Indonesia. Selain itu isu LKM berkaitan langsung dengan pemerataan dan keadilan ekonomi, agar kekayaan jangan hanya beredar diantara orang kaya, (QS. al-Hasyr 59: 7).⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Studi literatur (*literature studi*) digunakan untuk melihat indeks inklusi keuangan pada sektor Lembaga Keuangan Mikro pada dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bahan primer. Bagi peneliti, studi literatur sangat tepat untuk melihat ketimpangan atau gap antara kontribusi inklusi keuangan berbagai sektor dengan sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Inilah yang akan dipecahkan dan dijawab oleh peneliti. Kenapa terjadi gap, apa penyebabnya, bagaimana mengatasinya. Teknik penggalan data dilakukan dari hasil survei inklusi keuangan seluruh sektor yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Dimana dokumentasi yang dipilih adalah dokumen eksternal berupa laporan hasil survei OJK yang dapat diakses pada web: ojk.go.id. Beberapa data primer seperti persentase inklusi keuangan untuk sektor jasa keuangan, diantaranya perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro. Data dan informasi tentang inklusi keuangan

⁸ Kim, K. H., & Roberts, C. W. (2016). Targeting EZH2 in cancer. *Nature medicine*, 22(2), 128-134.

⁹ Lihat, QS. al-Hasyr 59: 7

yang didapat dari proses penggalian dan pengumpulan data pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan *content analysis* (Lexy J. Moleong, 2017) dan didiskripsikan dengan sifat induktif (Afifuddin, 2012) dan selanjutnya disajikan hasil penelitiannya disertai dialog teoritis untuk menghasilkan sebuah temuan berupa konsep, gagasan baru, atau formula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang indeks inklusi keuangan Indonesia pada sektor lembaga keuangan mikro (LKM) masih terbilang sangat minim. Sebagai pembanding sejumlah penelitian terdahulu menjadi bahan peneliti dan ditemukan perbedaan substantif, terutama dari sisi ide maupun metode dan lokus penelitian.

Penelitian tentang LKM dilakukan Hermes (2018) (Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, 2018), hasilnya menunjukkan efisiensi LKM dan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan rumah tangga miskin dan usaha kecil ditentukan oleh sejauh mana pasar keuangan negara berkembang. Di satu sisi, pasar keuangan yang berkembang dengan baik menyediakan lingkungan di mana LKM dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya. Di sisi lain, pasar keuangan yang berkembang dengan baik juga dapat menggantikan LKM dan / atau dapat menyebabkan nasabah LKM mengambil banyak pinjaman, sehingga mengurangi efisiensi. Peneliti juga menemukan bukti kuat bahwa efisiensi LKM berhubungan positif dengan tingkat perkembangan pasar keuangan. Hal ini dipertegas oleh penelitian Milana dan Ashta (2020) (Milana & Ashta, 2020) yang menemukan bahwa lembaga keuangan mikro telah bekerja dengan baik secara ekonomi dalam mengoperasikan kredit mikro. Namun tujuan untuk meningkatkan standar hidup rakyat kurang mampu umumnya belum terpenuhi. Solusi yang ditawarkan Porkodi dan Aravazhi (2013) (Porkodi & Aravazhi, 2013) dalam *penelitian mereka menyoroti* pengawasan dalam hal keuangan dan teknologi serta tanggung jawab sosial. Karena bagi mereka, hal itu sangat penting untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan kapasitas dan mata pencaharian masyarakat kurang mampu. Sama halnya dengan Ibor et.al (2017) (Ina Ibor et al., 2017), yang menyatakan ada dampak positif dan signifikan antara inklusi keuangan dengan operasi dan pertumbuhan UMKM, tapi tergantung jarak ke titik akses jasa keuangan dan kekurangan infrastruktur, ditantang akses layanan keuangan yang cepat dan efektif oleh UMKM. Selain solusi yang ditawarkan Porkodi dan Arvazhi, peneliti juga menyarankan harus menyebarkan titik akses ke lebih banyak daerah pedesaan dan meningkatkan infrastruktur untuk mempromosikan inklusi keuangan. Studi Al-Awlaqi dan Aamer (2019) (Al-Awlaqi & Aamer, 2019), juga menegaskan pentingnya beroperasi di daerah pedesaan untuk meningkatkan produktivitas LKM. Untuk itu, Li et.al (2020) (Li et al., 2020), menunjukkan bahwa return on asset, credit depth of information index memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan LKM. Penelitian lain sebagai referensi dan

pembandingan datang dari (Dabla-Norris, et.al, 2021¹⁰; Akanfe, et.al, 2020¹¹; Nizam, et.al, 2020¹²; Usman, et.al, 2021¹³; Siddik & Kabiraj, 2020¹⁴), dan lainnya.

Temuan sejumlah hasil penelitian yang sudah dipaparkan baik dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa sektor usaha LKM memberikan kontribusi besar terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Olehnya itu, penting kebijakan pemerintah yang memihak untuk memacu lembaga keuangan mikro lebih memberikan sumbangsih terhadap indeks inklusi keuangan di Indonesia.

1. Analisis Indeks Inklusi Keuangan Indonesia Sektor Lembaga Keuangan Mikro

Inklusi keuangan di Indonesia meningkat dengan laju yang berbeda-beda juga didasarkan atas kontribusi di setiap sektor usaha. Pada tahun 2019, sektor yang paling besar menyumbang adalah Perbankan dengan 73,88%, diikuti lembaga pembiayaan yang memberikan kontribusi inklusi keuangan sebesar 14,56%. Selanjutnya ada sektor asuransi menyumbang 13,15%. Sementara sektor usaha pegadaian ikut menopang inklusi keuangan Indonesia sebesar 12,38% dan sektor dana pensiun 6,18%. Sedangkan sektor pasar modal hanya mampu memberikan sumbangsih inklusi keuangan sebesar 1,55%. Kontribusi terkecil datang dari sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang hanya mampu menyokong inklusi keuangan Indonesia 0,72%.

Tentunya kontribusi inklusi keuangan yang disumbangkan oleh LKM berbanding terbalik dengan perhatian besar pemerintah akan LKM. Itu memberikan sinyal bahwa LKM yang menjadi basis ekonomi masyarakat kecil tak mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Minimnya kontribusi inklusi keuangan dari sektor LKM, berbanding lurus dengan kontribusi literasi keuangan LKM yang hanya mampu menyumbang 0,85%. Artinya pemahaman atau pengetahuan akan LKM oleh masyarakat masih sangat rendah. Kondisi ini agak berbeda dengan literasi Perbankan yang sinergis dengan inklusinya. Misalnya sektor Perbankan memiliki literasi tertinggi hingga mencapai 36,12%. Berikutnya sektor asuransi 19,40%, diikuti sektor pegadaian 17,81%. Selanjutnya sektor lembaga pembiayaan yang menyumbang literasi keuangan sebesar 15,17%. Setelah itu sektor dana pensiun 13,14%, dan sektor pasar modal sebesar 4,92%. Perbandingan literasi dan inklusi keuangan Indonesia berdasarkan sektor jasa keuangan, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sampai mendapat perhatian Presiden RI, Joko Widodo. Berbicara kepada media dalam Rakornas TPAKD, Kamis, 12 Oktober 2020. Presiden

¹⁰ Dabla-Norris, E., Ji, Y., Townsend, R. M., & Unsal, D. F. (2021). Distinguishing constraints on financial inclusion and their impact on GDP, TFP, and the distribution of income. *Journal of Monetary Economics*, 117, 1–18.

¹¹ Akanfe, O., Valecha, R., & Rao, H. R. (2020). Design of an inclusive financial privacy index (INF-PIE): a financial privacy and digital financial inclusion perspective. *ACM*

¹² Nizam, R., Abdul Karim, Z., Sarmidi, T., & Abdul Rahman, A. (2020). Financial Inclusion and Firms Growth in Manufacturing Sector: A Threshold Regression Analysis in Selected Asean Countries. *Economies*, 8(4), 80.

¹³ Usman, M., Makhdom, M. S. A., & Kousar, R. (2021). Does financial inclusion, renewable and non-renewable energy utilization accelerate ecological footprints and economic growth? Fresh evidence from 15 highest emitting countries. *Sustainable Cities and Society*, 65, 102590.

¹⁴ Siddik, M. N. A., & Kabiraj, S. (2020). Digital finance for financial inclusion and inclusive growth. In *Digital transformation in business and society* (pp. 155–168). Springer.

mendesak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tanah air.¹⁵

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia per 2019 hanya 76%, jauh di bawah negara tetangga. Thailand, misalnya, memiliki tingkat literasi keuangan 82% dan Malaysia memiliki 85 persen dan Singapura memiliki tingkat literasi keuangan hingga 98%. Kondisi ini diperparah dengan kredit bank umum 73,7%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Walaupun tingginya angka kredit ini, namun hanya berputar di area Pulau Jawa. Artinya, porsi kredit di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak lebih dari 27%.¹⁶ Situasi paradox antar sektor usaha lembaga keuangan, baik Perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya termasuk Lembaga Keuangan Mikro ini perlu mendapat perhatian pemerintah terutama para pengambil kebijakan terkait inklusi keuangan Indonesia.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sebagai akibat dari kombinasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap LKM dan pengelolaan keuangan yang kurang mendukung masyarakat Indonesia. *Marginal Propensity to Consume*¹⁷ masyarakat tumbuh, sesuai dengan trend. Alasan mendasar untuk ini adalah budaya menabung masyarakat yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK memperkenalkan produk tabungan ramah anak serta program AYO ke Bank.

Selain budaya tabungan yang buruk, akses keuangan yang rendah didukung oleh penetrasi perbankan yang rendah, transaksi pembayaran yang terbatas, akses kredit yang terbatas, dan akses layanan asuransi yang terbatas, yang semuanya disebabkan oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tanggungan yang cukup, seperti ditentukan oleh bank untuk memperoleh kredit, dan kurangnya minat lembaga keuangan untuk bekerja di sektor ini.

Guna mengatasi kondisi di atas, pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia saat ini sedang membuat terobosan baru di bidang keuangan digital. Sebagai hasil dari transaksi di dunia digital, literasi dan inklusivitas keuangan harus ditingkatkan. Terobosan ini berdampak besar terhadap naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat. Tercatat pembiayaan mencapai Rp 749,42 miliar pada 2020, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah tersebut naik 21,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 615,92 miliar.

Untuk menguatkan dan mempertahankan kenaikan pembiayaan LKM, OJK telah menetapkan tiga pilar untuk meningkatkan pengetahuan dan inklusi keuangan agar tidak tertinggal dari negara lain, infrastruktur besar, pendidikan, dan kreativitas. Pilar pertama adalah pendidikan masif, yang

¹⁵ Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, Presiden: Pakai Cara Inovatif. Dimuat dalam Media Indonesia, Kamis 10 Desember 2020. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/367808/inklusi-keuangan-ri-masih-rendah-presiden-pakai-cara-inovatif>

¹⁶ Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, op.cit

¹⁷ Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*, disingkat MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposibel bertambah satu unit. jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan disposibel, sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, di mana jika pendapatan disposibel terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Lihat, (H. Abdul Wahab, 2020)

dilakukan dengan mengunjungi setidaknya 24 kota di Indonesia setiap tahun. Pilar kedua adalah penciptaan teknologi infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Pilar ketiga adalah inovasi dan kreasi, yang mencoba memaparkan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga program yang ada dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, Thomas Dewaranu, peneliti di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), berpendapat bahwa literasi keuangan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan, atau memperoleh akses ke sistem keuangan formal bagi mereka yang tidak bankable, harus diikuti dengan literasi keuangan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan.¹⁸

Dengan melibatkan masyarakat sebagai nasabah yang sadar akan haknya dalam menggunakan layanan keuangan, pentingnya literasi sebagai faktor vital dalam perluasan inklusi keuangan Indonesia dapat ditingkatkan. Ini harus dimulai dengan pemahaman mendasar tentang konsep keuangan. Hanya 38% masyarakat umum yang memahami literasi keuangan saat penelitian ini dilakukan, menurut data OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dengan hanya 0,85 persen, lembaga keuangan mikro memiliki pemahaman paling sedikit tentang inklusi keuangan. Hal ini penting bagi lembaga keuangan mikro dalam upaya memberikan kredit kepada UKM sehingga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan.

Hingga kini, sekitar 92 juta orang dewasa di Indonesia tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Kehadiran lembaga keuangan non-bank seperti fintech tentu dapat membantu masyarakat *unbanked*, namun harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mengetahui layanan yang dapat mereka akses, risiko yang mereka hadapi, dan pengamanan yang harus mereka lakukan saat melakukan transaksi keuangan. Kesadaran masyarakat atau organisasi yang tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, disebutkan Davidsson (2015) (Davidsson et al., 2010) dalam penelitiannya memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami kemerosotan kinerja.¹⁹ Masalah akses layanan keuangan yang menjadi salah satu faktor lambatnya inklusi keuangan juga disampaikan oleh Sanjaya dan Nursechafia (2016) (Sanjaya & Nursechafia, 2016) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa dimensi aksesibilitas berdampak besar terhadap inklusi keuangan di Indonesia, sedangkan dimensi ketersediaan dan penggunaan memiliki pengaruh yang kecil. Ini mengarah pada kesimpulan bahwa orang miskin memiliki akses terbatas ke layanan keuangan.

Kesadaran masyarakat akan haknya sebagai konsumen jasa keuangan harus dimulai dengan pemahaman dasar tentang jasa keuangan. Upaya untuk mengembangkan literasi layanan keuangan di masyarakat sulit karena masyarakat Indonesia beragam dari segi budaya, bahasa, tingkat

¹⁸ Thomas Dewaranu (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Berada di Urutan Paling Bawah. Dimuat oleh Merdeka.com, Selasa, 2 November 2021. Diakses pada tanggal 27 September 2021. <https://www.merdeka.com/uang/pemahaman-masyarakat-tentang-lembaga-keuangan-mikro-berada-di-urutan-paling-bawah.html>

¹⁹ Davidsson, P. (2015). Small Firm Growth Small Firm Growth Per Davidsson School of Management Queensland University of Technology (and Jönköping International Business School) Gardens Point , Brisbane 4001 Queensland, Australia Leona Achtenhagen Jönköping International Busin. (January 2010).

pendidikan, cara hidup, dan fitur kegiatan ekonomi. Jika pemahaman dasar akan Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga jasa keuangan dapat diterima masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan inklusi keuangan, dimana masyarakat mulai bisa melakukan transaksi pembayaran, mengakses kredit, layanan asuransi, pasar modal dan tentunya memanfaatkan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai wadah jasa pelayanan keuangan.

Dengan demikian, pasar keuangan negara akan meningkat. Keterbukaan akses layanan jasa keuangan yang diberikan LKM dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, berinvestasi dengan tabungan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat (Allen et al., 2012), secara tidak langsung dapat menjadi faktor pemicu peningkatan inklusi keuangan. Pendapat Allen dan analisis di atas relevan dengan penelitian Hermes, et.al (Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, 2018) menyatakan bahwa kontribusi dan kapasitas LKM pada peningkatan inklusi keuangan rumah tangga miskin dan usaha kecil ditentukan oleh sejauh mana pasar keuangan negara berkembang. Di satu sisi, pasar keuangan yang berkembang dengan baik menyediakan lingkungan di mana LKM dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya, dan berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih meningkat. Kontribusi LKM dalam inklusi keuangan dipertegas Beck & Demirgüç-kunt (2008) dalam penelitian mereka bahwa inklusi keuangan memungkinkan para pelaku UMKM mengembangkan usaha dan menerapkan investasi yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi terbaru yang akan meningkatkan daya saing dan menciptakan inovasi. (Demirgüç-Kunt, A.; Beck, T.H.L.; Honohan, 2008)

Indeks inklusi keuangan dihitung dengan menggunakan variabel aksesibilitas, ketersediaan layanan perbankan, dan penggunaan sistem perbankan. Karena sektor keuangan merupakan bagian terpenting dari perekonomian Indonesia, maka sering dijadikan sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan menilai IFI di database provinsi, pembuat kebijakan dapat memprioritaskan reformasi dan mendorong desain kebijakan yang lebih berani berdasarkan temuan empiris, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan negara.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa indeks inklusi keuangan akan meningkat jika dilakukan penguatan literasi keuangan secara masif bagi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat yang akhirnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Selain itu, pemerataan akses layanan jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan, sehingga asas adil dan merata dalam menikmati akan jasa keuangan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari area perkotaan hingga pedesaan.

Sistem keuangan yang inklusif harus dapat diakses oleh semua pengguna, oleh karena itu harus menjangkau berbagai kalangan. Penetrasi perbankan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang dapat dilayani sektor jasa perbankan.

2. Hambatan, Tantangan, Peluang, Hambatan, dan Solusi Sektor LKM Guna Meningkatkan Indeks Inklusi Keuangan

a. Hambatan

Sejumlah hambatan peningkatan inklusi keuangan pada sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro yang dapat dipecahkan dalam hasil penelitian ini antara lain:

1) Literasi Keuangan Rendah

Seperti dijelaskan dalam analisis bagian pertama, bahwa inklusi keuangan berkorelasi dengan literasi masyarakat akan lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Jika literasi masyarakat rendah akan berdampak pada rendahnya inklusi keuangan masyarakat. Sebagaimana dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi LKM terkait literasi keuangan hanya mencapai 0,85%. Kontribusi ini berdampak pada inklusi keuangan LKM yang menyumbang 0,72%. Eksistensi LKM ini ikut serta memberikan dampak terhadap indeks inklusi keuangan Indonesia yang rendah. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang terkait dengan inklusi dan literasi keuangan bahwa pentingnya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Lembaga Keuangan Mikro, karena berkorelasi dengan hayat hidup masyarakat sasaran inklusi sekaligus mengantisipasi kesenjangan antar wilayah Barat dan Timur Indonesia. Selain kesadaran kolektif dibutuhkan juga komitmen yang lebih kuat untuk meningkatkan inklusi keuangan (Lyons & Kass-Hanna, 2021) Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Liu, Wang, dan Chan (2020) (Lee et al., 2020) bahwa literasi keuangan yang kuat akan berdampak besar pada keputusan keuangan pribadi atau individu yang sehat dan memiliki implikasi kebijakan publik yang penting. Selain itu para pengambil kebijakan sudah harus mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap rendahnya inklusi keuangan dari sektor Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

Menurut Bhushan dan Medury (2013), literasi keuangan sangat penting karena berbagai alasan. Konsumen yang telah membangun uang, membeli asuransi, dan mendiversifikasi investasi mereka mungkin dapat menavigasi melalui masa ekonomi yang sulit. Kebiasaan keuangan yang baik, seperti membayar tagihan tepat waktu, melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu, menabung sebelum habis, dan menggunakan kartu kredit dengan bijaksana, semuanya terkait dengan literasi keuangan. Kerugian individu akan timbul sebagai akibat dari kurangnya kesadaran keuangan, baik akibat inflasi, penurunan kondisi ekonomi lokal dan internasional, atau perluasan sistem ekonomi, yang menyebabkan individu menjadi lebih konsumernisme atau boros. Selain itu, ketidakmampuan seseorang untuk berinvestasi atau mengakses pasar keuangan terhambat oleh kurangnya pendidikan keuangan. (Puneet Bhushan, 2013)

Literasi keuangan merupakan salah satu perhatian yang paling penting bagi pemerintah, industri perbankan, konsumen, dan organisasi lainnya, menurut temuan penelitian Indrawati (Wardhono et al., 2016). Secara spesifik, peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa strategi prioritas, antara lain: 1) memberikan pendidikan literasi keuangan bagi generasi mendatang melalui sistem pendidikan formal; 2) meningkatkan akses informasi dan kebijakan pemerintah serta menjadi instrumen dan

sumber daya pengelolaan keuangan; dan mendorong peningkatan kualitas pemahaman keuangan melalui berbagai program. Untuk memulai, upaya peningkatan literasi keuangan melalui pendidikan formal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam kurikulum, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga pengajar dalam program pelatihan pembelajaran profesional, mengembangkan sumber daya pengajaran dan siswa melalui ekonomi khusus dan kurikulum bisnis, dan meningkatkan kepercayaan. serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, inisiatif untuk meningkatkan ketersediaan informasi, menyediakan instrumen, dan membangun sumber daya keuangan, termasuk meningkatkan akses publik ke semua informasi manajemen keuangan dan mempromosikan literasi keuangan berbasis tempat kerja, antara lain. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan infrastruktur untuk mendukung sektor keuangan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perluasan dan kedalaman akses produk dan layanan keuangan. Ketiga, penguatan literasi keuangan melalui berbagai program dan layanan, termasuk praktik yang baik, dengan fokus khusus pada kelompok masyarakat yang masih rentan terhadap perubahan atau sulit dijangkau baik secara lokal maupun konseptual. Keempat, melalui berbagai seminar dan forum nasional literasi keuangan, memperkuat koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan peluang kerjasama antar sektor dan daerah, serta kerjasama internasional. Kelima, meningkatkan penelitian dan evaluasi berbagai program literasi keuangan melalui partisipasi aktif dalam seminar internasional, mengembangkan penelitian terkait tingkat literasi keuangan dan determinan literasi keuangan di masyarakat, praktik yang baik dalam pelaksanaan program maupun evaluasi, peningkatan keahlian dan sharing knowledge, dan mendorong penelitian untuk mendukung efektivitas dan dampak program literasi keuangan.

2) Akses Layanan Lembaga Keuangan Rendah

Selain literasi yang rendah, hambatan lain dalam peningkatan inklusi keuangan sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah masalah akses terhadap LKM itu sendiri. Dimana layanan jasa keuangan terbatas pada orang miskin dan kehilangan haknya. Padahal inklusi keuangan bertujuan untuk membantu setiap warga negara memiliki akses ke berbagai layanan yang lebih luas, tetapi lebih banyak perhatian harus diberikan kepada masyarakat miskin. Layanan dan solusi keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin. Pengertian keuangan inklusif, sebagai layanan holistik holistik, harus mampu menangani aplikasi yang bervariasi di semua lapisan masyarakat.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan merupakan kendala paling signifikan terhadap inklusi keuangan. Orang membutuhkan pengetahuan keuangan untuk merasa lebih nyaman ketika berhadapan dengan lembaga keuangan.

Membuat layanan keuangan harus lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Sementara hambatan yang paling umum untuk akses masyarakat miskin ke layanan keuangan adalah pembatasan geografis dan administratif. Memecahkan masalah ini akan menjadi langkah maju yang besar dalam memperoleh akses ke layanan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro. Global Financial Inclusion Index menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara yang layanan akses keuangan kepada masyarakat sangat rendah sekitar 20% dibanding negara-negara maju. Penyebab rendahnya adalah kurangnya kemampuan masyarakat untuk meminjam dan mengakses layanan perbankan.

Hossain juga menyoroti manfaat inklusi keuangan, dia mengklaim bahwa layanan keuangan membantu orang miskin dengan memungkinkan mereka untuk meminjam dan menyimpan uang untuk sekolah, investasi bisnis, pembelian besar, atau masalah kesehatan. (Hossain, 2016) Menurut Churchill, dkk. (2020)²⁰, masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan yang tidak pasti dan tidak terduga tidak dapat memperoleh layanan keuangan. Mereka akan dapat merencanakan masa depan dan melindungi diri dari hal-hal yang tidak terduga jika mereka memiliki akses ke pembiayaan. Pencurian uang tunai juga cukup umum.

3) Budaya tabungan yang buruk

Sekalipun mereka memiliki akses ke layanan keuangan, masih ada segmen masyarakat yang belum bisa memanfaatkannya. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terlalu jauh dari bank atau memiliki pengalaman buruk dengan penyedia layanan. Akibatnya, memiliki rekening saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa sistem keuangan inklusif; itu juga harus dapat diakses. Kredit, deposito, pembayaran, pengiriman uang, dan transfer adalah contoh dari penggunaan ini. Indikator penggunaan, seperti keteraturan, frekuensi, dan durasi penggunaan, digunakan untuk mengukur penggunaan aktual produk dan layanan keuangan.

4) Penetrasi perbankan yang rendah

Menurut Bank Dunia, akses ke keuangan layanan berasal dari berbagai sumber, termasuk individu, tangga rumah, dan bisnis yang mengambil pinjaman, mengambil kartu kredit, melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya, baik resmi maupun informal. Indikator terbaik mengukur akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti berapa banyak orang yang menggunakan rekening bank dan berapa banyak orang yang menggunakan layanan lembaga keuangan kredit. Namun, tidak semua negara, terutama yang memiliki lembaga keuangan mikro, memiliki data yang lengkap. Indikator yang paling relevan untuk menentukan akses layanan tabungan adalah jumlah rekening bank per 1.000 orang.

Dengan memberikan pinjaman kepada peminjam yang terdampar di dasar piramida moneter, sektor keuangan mikro menjadi sangat penting dalam mendorong

²⁰ Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial inclusion and poverty: a tale of fortyfive thousand households. *Applied Economics*, 52(16), 1777–1788.

evolusi yang lengkap. Dengan kemajuan bidang ini, rumah tangga berupah rendah telah memperoleh banyak kebebasan dengan mendapatkan akses sederhana ke kemajuan. Wilayah ini telah memiliki kemampuan untuk meregangkan sekitar 6,4 crore peminjam hidup yang luar biasa untuk memberikan kredit kepada para peminjam yang sebelumnya tidak mengetahui administrasi moneter standar.

5) Akses kredit yang terbatas karena adanya kapitalisasi

Masyarakat miskin yang tidak memiliki tanggungan yang cukup, seperti ditentukan oleh bank untuk memperoleh kredit, dan kurangnya minat lembaga keuangan untuk bekerja di sektor ini.

Orang berpenghasilan rendah dengan pendapatan yang tidak jelas dan tidak terduga, menurut Churchill, et.al (2020)²¹, merupakan kelompok yang tidak dapat memperoleh jasa keuangan. Akses ke keuangan, di sisi lain, akan memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan dan melindungi diri mereka dari hal-hal yang tidak terduga. Pencurian uang tunai juga cukup umum.

Terbatasnya akses kredit di lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan termasuk LKM, menurut penelitian Anane et.al (2021) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro belum dapat melakukan bisnis secara efektif karena kapitalisasi. Program sensitisasi diperlukan untuk mengaktifkan lembaga keuangan mikro untuk mengkonfigurasi metode pembiayaan inovatif untuk meningkatkan kapitalisasi. Di sana adalah kebutuhan untuk meningkatkan sumber dana dan mobilisasi modal untuk memaksimalkan keuangan mereka kinerja dan meningkatkan akses petani ke kredit. Edukasi kepada petani untuk memahami pemberi kredit persyaratan juga dapat meningkatkan akses petani ke kredit keuangan mikro.(Anane et al., 2021)

Lembaga keuangan mikro memainkan peran kunci dalam meningkatkan kehidupan jutaan orang berpenghasilan rendah, sementara juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. Karena masalah yang dihadapi lembaga keuangan mikro saat ini, sangat penting bagi industri untuk mengembangkan proses tata kelola dan peraturan yang kuat. Keberhasilan industri di masa depan akan ditentukan oleh kemampuan pemain untuk membentuk kemitraan baru, memproduksi barang baru, membuka saluran investasi baru, dan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen.(Gupta, 2021)

Sementara itu, di pasar negara berkembang, layanan tabungan informal terkadang dikaitkan dengan biaya administrasi yang tinggi. Orang miskin pada umumnya tidak dapat menabung, baik dalam bentuk tunai maupun dalam simpanan tersembunyi di bawah kasur atau dalam toples kaca, bahkan ketika mereka memiliki uang yang sederhana untuk dibelanjakan, karena mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan

²¹ Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial Inclusion and Poverty: A Tale of Fortyfive Thousand Households. *Applied Economics*, 52 (16), 1777–1788.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ekonomi yang kompleks (Alhassan, et.al, 2021)²²; (Cull, et.al, 2021)²³; (Gyasi & Adam, 2021)²⁴; (Lu, Wu, & Liu, 2020),²⁵

Ternyata ada pelaku usaha tertentu yang mengetahui atau tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan pembiayaan ini. Namun, mereka masih ragu untuk memberikan modal perusahaan karena mereka percaya pinjaman berbasis tekfin terlalu membebani karena pembatasan dan tagihan yang harus dibayar setiap bulan, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan pendapatan para pelaku bisnis. Dalam rangka mempercepat dan memperluas inklusi keuangan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mendorong literasi keuangan di kalangan pelaku usaha LKM dan memberikan jaminan keamanan finansial kepada pelaku usaha.

b. Peluang

Dengan populasi lebih dari 260 juta orang, Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara Pasifik. Enam puluh persen penduduk berusia di bawah 35 tahun, dan mereka disebut sebagai "penduduk asli digital" di era internet. Milenial dan digital native ini memiliki persentase penetrasi internet dan ponsel yang tinggi, dan angka ini terus meningkat. Akibatnya, Indonesia adalah tambang emas peluang fintech yang luar biasa.

Sektor fintech di Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau populasi yang melek teknologi namun belum memiliki rekening bank. Pengguna aplikasi tekfin dapat memanfaatkan akses yang lebih mudah ke layanan keuangan, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, atau agama. Agar fintech dapat diimplementasikan tepat waktu, pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi kepentingan publik. Lebih lanjut, mengingat peluang dan potensi start-up yang dipimpin oleh anak muda, pemerintah harus membina dan mendukung kolaborasi antar lembaga serta membuka kolaborasi dengan perusahaan fintech muda untuk membangun bagian-bagian baru perekonomian.

Selain itu peluang datang dari sejumlah program yang kini diimplementasikan pemerintah bekerjasama dengan lembaga atau stakeholder lainnya yang konsen dan fokus pada masalah inklusi keuangan. Sebut saja pihak Perbankan dan non perbankan. Pekerjaan ini juga dilakukan melalui beberapa program, antara lain; Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai), Simpanan Pelajar, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Bank Wakaf Mikro, Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM, Kredit Usaha Rakyat, Layanan Keuangan Mikro.

²² Alhassan, A., Li, L., Reddy, K., & Duppati, G. (2021). The relationship between political instability and financial inclusion: Evidence from Middle East and North Africa. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 353–374.

²³ Cull, R., Demircuc-Kunt, A., & Morduch, J. (2021). *Banking the world: empirical foundations of financial inclusion*. MIT Press.

²⁴ Gyasi, R. M., & Adam, A. M. (2021). Does financial inclusion predict a lower risk of loneliness in later life? Evidence from the AgeHeaPsyWel-HeaSeeB study 2016–2017. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1254–1261.

²⁵ Lu, Z., Wu, J., & Liu, J. (2020). Bank concentration and SME financing availability: the impact of promotion of financial inclusion in China. *International Journal of Bank Marketing*.

Kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan, serta akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga keuangan, pegadaian, dana pensiun, dan fintech, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Dari sudut pandang masyarakat umum atau konsumen, sebagian masih menolak untuk bertransaksi dengan bank atau lembaga keuangan lainnya karena rumitnya persyaratan administrasi, seperti permintaan izin usaha dan laporan keuangan yang layak dan sehat bagi calon debitur. Hal ini membawa konsekuensi sampingan dengan dikeluarkannya lembaga keuangan dari masyarakat. Faktor lainnya adalah margin bank syariah yang lebih tinggi dari bank biasa, terutama dalam pembiayaan murabahah, yang mengurangi daya saing mereka dibandingkan dengan bank normal. Ada juga keengganan masyarakat atau konsumen (penabung) untuk menggunakan jasa bank syariah karena keuntungan atau bonus yang diberikan bank syariah kurang menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan bank tradisional. Lebih lanjut, menabung merupakan kegiatan hemat biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka harus pergi ke bank, mengantri, dan membayar biaya administrasi yang relatif tinggi. Keengganan masyarakat bertransaksi dengan lembaga jasa bank ini membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Mikro yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi wadah tepat masyarakat menggunakan jasa LKM dalam bertransaksi.

Inisiatif-inisiatif berikut meliputi penciptaan pendidikan digital, dukungan program pendidikan dan literasi keuangan syariah terintegrasi serta pendidikan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur pendidikan, dan penguatan taktik aliansi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Sementara itu, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan memperkuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan program kerja untuk meningkatkan akses keuangan, serta mengembangkan dan memperkuat sistem informasi. Hal ini semua menjadi peluang untuk menaikkan indeks inklusi keuangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

c. Tantangan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meminjamkan uang kepada orang miskin yang tidak mampu meminjam dari bank sebagai alternatif pinjaman mikro. Pada akhirnya, LKM menyediakan jasa keuangan, tetapi tidak mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah bahwa pemberi pinjaman kredit mikro membutuhkan waktu lama untuk memaksimalkan pendapatan mereka, yang berarti bahwa inisiatif keuangan mikro syariah membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya. Kesulitan lain, menurut Shinkafi dkk, adalah bahwa meminjamkan kepada orang miskin justru dapat membuat mereka semakin miskin jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan arus kas yang dibutuhkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Pastikan efisiensi pinjaman mikro selalu sulit dan memakan waktu untuk keuangan mikro.

LKM menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan inklusi keuangan secara efektif. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan latar belakang pinjaman mikro bagi mereka yang mengambil pinjaman, kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus untuk mendidik peminjam, kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak pada Lembaga Keuangan Mikro, karena adanya kapitalisasi, kurangnya kesadaran pinjaman mikro di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, penulis merekomendasikan untuk memberikan inisiasi keuangan mikro dengan pelatihan atau pendidikan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh bagi kalangan LKM dalam menangani kreditur mikro, terutama masyarakat dengan kehidupan terbatas.

Dilain pihak, pengujian dan sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Inklusi keuangan berupa kemudahan akses, kualitas, dan penggunaan layanan lembaga keuangan oleh UMKM. Ketiga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM. Saat ini telah terdapat Financial Technology (Fintech) yang menggantikan sistem kerja lembaga keuangan tradisional. Marginingsih (2019) menjelaskan bahwa fintech oleh lembaga keuangan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional.²⁶ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan LKM untuk belajar dan mengimplementasikan fintech.

c. Solusi

Kinerja setiap LKM akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berinovasi agar sesuai dengan selera dan preferensi konsumen, yang akan memperluas jangkauan pasar dan memberikan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Karena tingkat persaingan semakin meningkat setiap hari, LKM harus kreatif dan imajinatif, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan mereka, yang akan memotivasi karyawan.

Kreatifnya LKM harus didukung dengan kesiapan infrastruktur pendukung dan akses terhadap teknologi informasi. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan pemanfaatan Palapa Ring secara umum terus meningkat. Pemerintah juga telah meluncurkan LokasiKu, sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

Dibandingkan dengan ekonomi industri Farrokhian dan Soleimani (Farrokhian & Soleimani, 2015) mengklaim bahwa LKM menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan teknologi dan lingkungan bisnis yang tidak bersahabat, yang mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.

Untuk itu pemerintah meningkatkan edukasi literasi dan inklusi keuangan dengan mengeluarkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, pelaku usaha di sektor jasa keuangan mendapatkan pelatihan setahun sekali.

²⁶ Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan.
ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Untuk meningkatkan indeks dan literasi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2020 untuk memberikan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya yang terjangkau, guna tetap menjaga hubungan baik tersebut. dan memenuhi target pada tahun 2024. Sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan kesenjangan kesejahteraan individu dengan masyarakat, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

KESIMPULAN

Kontribusi terkecil index inklusi keuangan berasal dari sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 0,72% dan ini relevan dengan kontribusi literasi keuangan LKM yang hanya mampu menyumbang 0,85%. Artinya pemahaman atau pengetahuan akan LKM oleh masyarakat masih sangat rendah dan itu berdampak buruk bagi inklusi keuangan Indonesia. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap LKM dan pengelolaan keuangan yang kurang mendukung masyarakat Indonesia.

Hambatan peningkatan inklusi keuangan pada sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro antara lain; Literasi keuangan rendah, akses layanan lembaga keuangan rendah, adanya budaya tabungan yang buruk dan tidak didukung dengan penetrasi perbankan sehingga ikut berdampak pada akses kredit yang terbatas disamping adanya kapitalisasi peluang dan kesempatan yang dilakukan para kapital terhadap LKM. Untuk peluang LKM dalam meningkatkan inklusi masih berpotensi besar, mengingat populasi lebih dari 273 juta orang atau sekitar 60% penduduk berusia di bawah 35 tahun, dan mereka disebut sebagai "penduduk asli digital" di era internet. Milenial dan digital native ini memiliki persentase penetrasi internet dan ponsel yang tinggi, dan angka ini terus meningkat. Tentu ini menjadi pasar strategis LKM dalam meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, sejumlah program terbuka bagi LKM dalam melaksanakan berbagai program terkait peningkatan inklusi keuangan, seperti Layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai), simpanan pelajar, mahasiswa dan pemuda, adanya Bank Wakaf Mikro, Layanan Konsumen & Akses Keuangan UMKM, program Kredit Usaha Rakyat BRI, dan Layanan keuangan mikro syariah.

Disamping itu, keengganan masyarakat bertransaksi dengan lembaga jasa bank ini membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Mikro yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi wadah tepat masyarakat menggunakan jasa LKM dalam bertransaksi. Sementara tantangan bagi LKM meminjamkan uang kepada orang miskin yang tidak mampu meminjam dari bank sebagai alternatif pinjaman mikro. Pada akhirnya, LKM menyediakan jasa keuangan, tetapi tidak mengentaskan masalah kemiskinan. Kondisi kurangnya pengetahuan dan latar belakang pinjaman mikro bagi mereka yang mengambil pinjaman, kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus untuk mendidik peminjam, kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak pada Lembaga Keuangan Mikro, karena adanya kapitalisasi, kurangnya kesadaran pinjaman mikro di Indonesia. Untuk itu, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai solusi guna peningkatan inklusi keuangan pada sektor

usaha Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia antara lain; *Pertama*, Peningkatan literasi keuangan yang harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan dan menyeluruh dari pelosok kota hingga pedesaan. *Kedua*, Dibukanya akses layanan keuangan Lembaga Keuangan Mikro bagi semua masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang regulasi memberikan suntikan modal bagi LKM sehingga LKM dapat memberikan pinjaman bagi masyarakat sasaran inklusi secara keseluruhan. *Ketiga*, Sinergisitas pemerintah, instansi terkait (OJK, BI, Perbankan, dan KNEKES) untuk membantu permodalan LKM sekaligus mensosialisasikan betapa pentingnya masyarakat memiliki tabungan sebagai jaminan kehidupan di masa mendatang. *Keempat*, penetrasi lembaga keuangan bukan saja dilaksanakan perbankan, tapi LKM dapat diikutsertakan sesuai dengan kemampuan modal yang dimiliki LKM. Penetrasi ini harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan

Selanjutnya keterbatasan penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan hanya bersifat tinjauan literatur, harus ada pembuktian secara kuantitatif, mengapa kontribusi sektor usaha LKM paling rendah dibanding sektor usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, B. A. S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. ke-2). CV. Pustaka Setia.
- Ahmed, A. V., & Babalola, K. (2016). *An Enquiry into the Contributions of Microfinance Institutions Towards the Development of Small Scale Business in Nigeria*. January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2745988>
- Al-Awlaqi, M. A., & Aamer, A. M. (2019). Financial and social efficiency in the Yemen microfinance institutions: A Hicks–Moorsteen TFP index analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 322–345. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2017-0276>
- Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Soledad Martinez Peria, M., & Peria, M. (2012). The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts are in the Development. In *Policy Research Working Paper 6290* (Issue December).
- Anane, I., Zhang, Y., & Nie, F. (2021). The Sources of Microfinance Capital and its Effects on Farmers access to Credit in Ghana. *SVU-International Journal of Agricultural Sciences*, 0(0), 0–0. <https://doi.org/10.21608/svuijas.2021.61143.1080>
- Davidsson, P., Achtenhagen, L., & Naldi, L. (2010). Small firm growth. In *Foundations and Trends in Entrepreneurship* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.1561/03000000029>
- Demirgüç-Kunt, A.; Beck, T.H.L.; Honohan, P. (2008). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research report)*. Washington, D.C: World Bank. <https://doi.org/DOI: 10.1596/978-0-8213-7291-3>
- Farrokhian, R., & Soleimani, F. (2015). Assessing capabilities for innovation - The case of Iranian kalleh meat product company. *International Conference on Operation Excellence and Service Engineering*, 23–32.
- Gupta, J. (2021). *Micro Finance Activities Offered by Small Finance Banks in India*. 4(6), 127–131.
- H. Abdul Wahab. (2020). Pengantar Ekonomi Makro. In *Alauddin University Press*. Alauddin University Press.
- Hermes, N., Lensink, R., & Meesters, A. (2018). *No Title Financial Development and the Efficiency*

- of Microfinance Institutions* (J. N. M. and J. N. Laura J. Spence, Jędrzej G. Frynas (ed.)).
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.4337/9781784711825](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.4337/9781784711825)
- Hossain, S. T. (2016). *Financial Crisis , Inclusion and Economic Development in the US and OIC Countries*. University of New Orleans.
- Ina Ibor, B., Offiong, A. I., & Mendie, E. S. (2017). Financial Inclusion and Performance of Micro, Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 5(3), 104–122.
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i3.2017.1758>
- Kuangan, O. J. (2020). *Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional*.
- Kim, J. H. (2016). A study on the effect of financial inclusion on the relationship between income inequality and economic growth. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(2), 498–512.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1110467>
- Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020). Financial inclusion, financial innovation, and firms' sales growth. *International Review of Economics & Finance*, 66, 189–205.
<https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.11.021>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 36). PT. Remaja Rosdakarya.
- Li, Y., Yang, Y., Li, G., & Zhao, X. (2020). Study on Sustainable Development of Microfinance Institutions from the Perspective of Inclusive Finance—Based on MFI Data in Countries along the Belt and Road. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(13), 3205–3216.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1684893>
- Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). Financial Inclusion, Financial Literacy and Economically Vulnerable Populations in the Middle East and North Africa. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(9), 2699–2738. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1598370>
- Masnita, Y., Triyowati, H., & Khomsiyah, K. (2020). Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *JUARA: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.25105/juara.v1i1.5911>
- Milana, C., & Ashta, A. (2020). Microfinance and financial inclusion: Challenges and opportunities. *Strategic Change*, 29(3), 257–266. <https://doi.org/10.1002/jsc.2339>
- Nogueira, S., Duarte, F., & Gama, A. P. (2020). Microfinance: where are we and where are we going? *Development in Practice*, 30(7), 874–889.
<https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1782844>
- OJK. (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017). *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–99.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Porkodi, S., & Aravazhi, D. D. (2013). Role OF Microfinance and Self Help Groups in Financial Inclusion. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(3), 137–149.
- Puneet Bhushan, Y. M. (2013). Financial Literacy and its Determinants. *International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBA)*, 4 (2)(July), 155–160.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam
- ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 10.

Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2016). Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif: *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(3), 281–306.

Tahiri Jouti, A. (2018). Islamic finance: financial inclusion or migration? *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 277–288. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0074>

Umar, A. I. (2017). Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 20(1), 99–126. <https://doi.org/10.21098/bemp.v20i1.726>

Wardhono, A., Qori'Ah, C. G., & Indrawati, Y. (2016). The determinants of financial inclusion: Evidence from Indonesian districts. *International Journal of Economic Perspectives*, 10(4), 472–483.